



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Sampang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Sampang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan program pembangunan tahun 2019 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2019 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwasanya RKPD tahun 2019 ini merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD yang akan datang, maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Sampang 2005 – 2025, pokok-pokok pikiran DPRD dan isu strategis pembangunan.



Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019, RKP Tahun 2019, RPJMD Provinsi Jawa-Timur 2014-2019 dan sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah;

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
 - a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
 - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
 - f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 - g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut **“NawaCita”**, yaitu:
 - a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara;
 - b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;



- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
 - d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
 - f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
 - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 - h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
 - i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
3. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:
- a. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan Tema ***“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”***. Memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional dan 30 (tiga puluh) Program Prioritas, yaitu :
- a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar,
 - b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman,
 - c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif,



- d. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air, dan
 - e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah ***“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”***, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :
- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
 - b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
 - c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
 - d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 - e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
6. Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan tema ***“Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”***. Berdasarkan tema tersebut serta menyelaraskan dengan prioritas nasional, maka terdapat 5 (lima) rencana prioritas utama dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, meliputi, yaitu:
- a. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan,
 - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan,
 - c. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan,
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan
 - e. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu.
7. RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi ***“Membangun Sampang Bersatu, Berkualitas, dan Berdaya***

Saing, Untuk Kesejahteraan Umat”. dimana penekanan kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. **Bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.** Dalam aspek pengembangan wilayah, pembangunan pada tahap ketiga diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan prasarana drainase, sanitasi dan air bersih. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana ini perlu ditunjang dengan pemantauan kelembagaan baik dari pengelola, pelaksana dan masyarakat;
- b. **Bidang Demografi.** Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar bagi wanita usia sekolah.
- c. **Bidang Ekonomi.** Pembangunan pada tahap ketiga diarahkan untuk pemeliharaan kinerja struktur perekonomian yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal. Dan juga pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier;
- d. **Bidang sosial** diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan angka partisipasi sekolah (APS) melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Perhatian di bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut yaitu dapat dijadikannya faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. **Bidang Prasarana dan Sarana.** Dalam aspek pengembangan wilayah, pembangunan pada tahap ketiga diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sampang didasarkan pada penataan ruang yang semakin baik



melalui peningkatan implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin meningkatkan system pengendalian

- f. **Bidang Pemerintahan.** Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitas kepada daerah dan masyarakat. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Pembangunan Bidang Politik, diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani.

8. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka perumusan program prioritas daerah tahun 2019 didasarkan pada hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana kesehatan, pendidikan dll) belum optimal. Fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 pada peningkatan prasarana publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan IPM terutama pada bidang pendidikan harus lebih fokus dan terarah. Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan pendidikan kesetaraan.
- c. Bidang kesehatan utamanya penanganan kesehatan ibu dan bayi serta penanganan gizi buruk di masyarakat.
- d. Penanganan kemiskinan lebih fokus dan terintegrasi antar program agar hasilnya lebih maksimal.
- e. Potensi unggulan yang belum dikelola secara optimal. Produk-produk unggulan daerah kita dibiarkan dan tidak ada nilai tambah. Pengelolaan potensi ekonomi ini lebih difokuskan pada pengelolaan produk unggulan, peran Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perindag serta Dinas Perijinan dan Penanaman Modal untuk lebih fokus dan bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi.



- f. Penanganan bencana alam banjir, sudah ada pada titik kritis, permasalahan dan penyebab banjir sudah teridentifikasi, tinggal pada tataran implementasi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing harus bersinergi untuk penanganan masalah ini.
 - g. Akses jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional di Kabupaten Sampang, banyak mengalami kerusakan, sehingga peran dan perhatian Pemerintah Provinsi sangat diharapkan dapat mengatasi masalah ini untuk dapat merealisasikan harapan masyarakat mendapat pelayanan sarana transportasi yang memadai.
 - h. Banyaknya kasus-kasus narkoba yang ada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu peran BNK perlu ditingkatkan utamanya dalam pencegahan kenakalan remaja dalam penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba, sehingga bangsa ini akan terselamatkan dari musuh paling berbahaya bagi kehidupan dan masa depan generasi muda kita.
9. Isu Strategis Pembangunan tahun 2019
- Berpijak pada permasalahan serta analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan professional. Pemerintah Kabupaten Sampang menyadari bahwa secara umum kinerja birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari belum baiknya mekanisme koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi sehingga memengaruhi proses dan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik perlu dilaksanakan secara terus-menerus, terutama meliputi kelembagaan, manajemen aparatur, manajemen perencanaan dan penganggaran, prosedur operasi standar (SOP/*standart operation procedure*), dan keterbukaan informasi publik yang memadai. Perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik serta



pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sampang.

- b. Pemerataan jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat terutama bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang merupakan akibat dari belum meratanya jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada bidang pendidikan rendahnya indeks pendidikan dipengaruhi oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan masih kurang, pemerataan guru pada daerah terpencil masih tinggi dan kesenjangan mutu pelayanan pendidikan pada sekolah swasta dan negeri.

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sampang juga masih rendah antara lain disebabkan oleh angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi, angka stunting, gizi buruk dan penyakit menular masih tinggi serta pertolongan nakes masih belum optimal. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar berupa sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat juga masih kurang, sehingga permukiman kumuh masih relatif tinggi dan kesehatan masyarakat belum terjamin dengan aman. Masalah pendidikan dan kesehatan berkorelasi langsung dengan kurang baiknya tingkat adaptasi, respon, antisipasi, peran aktif masyarakat terhadap upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Hal tersebut tampak dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan dasar di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2019.



c. Pertumbuhan ekonomi

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Sampang yang didominasi oleh sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk sekaligus menyerap banyak tenaga kerja menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Sampang. Agar menjadi pilar pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus pemerataan pendapatan, perlu dilanjutkan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui perbaikan proses produksi, penerapan teknologi pasca panen, peningkatan produksi tanaman hortikultura dan pengolahan produk pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi.

Tantangan dalam menjadikan sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kecenderungan beralihnya pemilihan lapangan kerja di kalangan kaum muda. Sektor ini dipersepsikan tidak prospektif dalam memberikan kesejahteraan sebesar dan secepat sektor lainnya karena posisi tawar-menawar (*bargaining position*) petani masih lemah.

Kontribusi sektor perdagangan dan industri juga belum optimal, sektor ini memberi peluang yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun demikian sektor ini belum bisa berkembang secara baik. Pengelolaan potensi unggulan utamanya pada sektor pariwisata juga perlu ditingkatkan, hal tersebut akan memacu pengembangan sektor-sektor lainnya misalnya pengembangan agroindustri, agrowisata, wanawisata, sentra UMK berbasis produk pertanian.

d. Penyediaan infrastruktur

Belum meratanya jumlah dan kualitas penyediaan infrastruktur (utamanya pada wilayah potensial menjadi pusat pertumbuhan) menjadi penyebab utama belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah yang dimiliki. Salah satu contoh, penyediaan jalan dan jembatan di bagian selatan-barat yang belum memadai (wilayah Kecamatan Sreseh dan Pengarengan) menghambat potensi/peluang wilayah tersebut menjadi lokasi industri kelautan, sebagai imbas positif dari beroperasinya Jembatan Suramadu. Pada pihak lain, intensitas yang sangat tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya



dan penggunaan lahan pada umumnya menimbulkan dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya baku mutu air). Sehubungan dengan itu, seluruh aktivitas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah semestinya mampu mengharmoniskan (*trade off*) antara kebutuhan memperoleh manfaat sosial ekonomi dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

e. Bencana Alam

Bencana alam yang sering terjadi adalah bencana alam banjir sering dan cenderung rutin terjadi di Kabupaten Sampang menjadi isu yang harus segera ditangani. Penanggulangan bencana alam banjir ditetapkan menjadi salah satu prioritas berdasarkan kerangka pikir bahwa bencana alam banjir dapat menurunkan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat Sampang disamping menimbulkan kerugian, baik kerugian langsung menimpa masyarakat (kerusakan/kehilangan harta benda, anggota keluarga yang tewas, terhambatnya aktivitas sehari-hari) maupun kerugian tidak langsung (rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum, terganggunya aktivitas pemerintahan, terganggunya aktivitas perekonomian). Tidak terjaminnya rasa aman dan nyaman (khususnya masyarakat yang daerahnya menjadi langganan bencana alam banjir) dapat menurunkan kepercayaan masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mampu melindungi keselamatan rakyatnya. Tingkat kepercayaan yang rendah menghambat bertumbuh kembangnya partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis lainnya dan keterbatasan kapasitas fiskal, penanggulangan bencana alam banjir dilaksanakan secara integratif bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah..

f. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang masih sangat tinggi dan tertinggi diantara kabupaten yang lain di Jawa Timur. Disamping sesuai dengan prioritas RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, penurunan tingkat kemiskinan ditetapkan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sampang. Masih tingginya angka kemiskinan

disebabkan masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan serta belum berenerginya program-program pengentasan kemiskinan baik secara baik. Pada sisi lain, hal tersebut menunjukkan belum optimalnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan selama ini, akibat dari belum tersedianya basis data yang akurat dan mutakhir tentang penduduk miskin (*by name by address*), serta belum padunya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 disusun berpedoman pada Rencana Program Jangka Panjang Kabupaten Sampang Tahun 2005 – 2025, dengan penekanan kebijakan sebagaimana telah disampaikan diatas. Selanjutnya agar kebijakan jangka panjang dapat dijalankan dengan tahapan yang baik dan sinergis maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai pelaksanaan tahun keempat RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005 -2025 adalah:

1. Pemenuhan dan perbaikan akses dasar masyarakat (universal akses);
2. Meningkatkan kualitas kesehatan, penurunan AKI, perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan penyakit menular serta pemenuhan sarana olah raga bagi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, kompetensi guru, dan sarana dan prasarana pendidikan;
4. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan;
5. Meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk;
6. Menjaga iklim investasi yang sehat serta penyederhanaan perijinan;
7. Meningkatkan daya saing dan kualitas produk UMKM;
8. Memperbaiki kinerja BUMD;
9. Meningkatkan kepariwisataan daerah untuk mengatasi pengangguran, dan peningkatan sarana perdagangan;
10. Meningkatkan mitigasi bencana melalui desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;



11. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam rangka pemerataan dan pengembangan wilayah;
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi melalui pengawasan dan keterbukaan informasi publik;
13. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Berbagai pendekatan perencanaan sebagaimana arahan nasional dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan (Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional) dapat saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berangkat dari permasalahan pembangunan, isu strategis pembangunan serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 4. 1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2019

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur Ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif	Peningkatan nilai tambah agro dan industry melalui pengembangan agro maritim serta pemanfaatan akselerasi kepariwisataan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMK, pariwisata dan agropolitan
4	Pemantapan ketahanan Energi, pangan dan sumber daya air	Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu	Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

Tema RKPDP Kabupaten Sampang Tahun 2019, menyelaraskan dengan tema nasional dan provinsi serta memperhatikan isu strategis daerah. Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sampang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta turut mendukung pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta RPJPD Kabupaten Sampang, maka tema RKPDP Kabupaten Sampang tahun 2019 adalah **“Pengembangan akses pelayanan dasar masyarakat serta peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi menuju Kabupaten Sampang yang harmonis, mandiri dan sejahtera”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPDP Kabupaten Sampang Tahun 2019 ini adalah Pelayanan dasar berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan infrastruktur dasar (kawasan permukiman, air bersih dan sanitasi masyarakat) dan infrastruktur daerah

terpencil sebagai fokus daerah yang masih terisolasi, tertinggal dan merupakan kantong kemiskinan, daerah stunting, serta menekankan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi termasuk pertanian, agropolitan, pariwisata, UMKM dan ketenaga kerjaan

Sinkronisasi tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sampang tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 4. 1
Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2015-2019



Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

Tabel 4. 2
Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Sampang dengan Tema RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

TAHUN	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
2015	Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan	Penguatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur melalui Pembangunan Industri Hulu Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar serta Penanggulangan Bencana Menuju Kabupaten Sampang yang Bermartabat



TAHUN	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
2016	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas	Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA akhir 2015	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar serta Perkuatan Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sampang yang Bermartabat
2017	Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah	Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Daya Saing Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sampang yang Bermartabat
2018	Memacu Investasi dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, Penanggulangan Bencana dan Daya Saing Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sampang yang Bermartabat
2019	Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi	Pengembangan akses pelayanan dasar masyarakat serta peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi menuju Kabupaten Sampang yang harmonis, mandiri dan sejahtera

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Selain pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*, perencanaan pembangunan di Kabupaten Sampang juga menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan ini sesuai dengan arahan nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan perencanaan dalam pencapaian prioritas pembangunan telah dilaksanakan guna akselerasi capaian prioritas, antara lain :

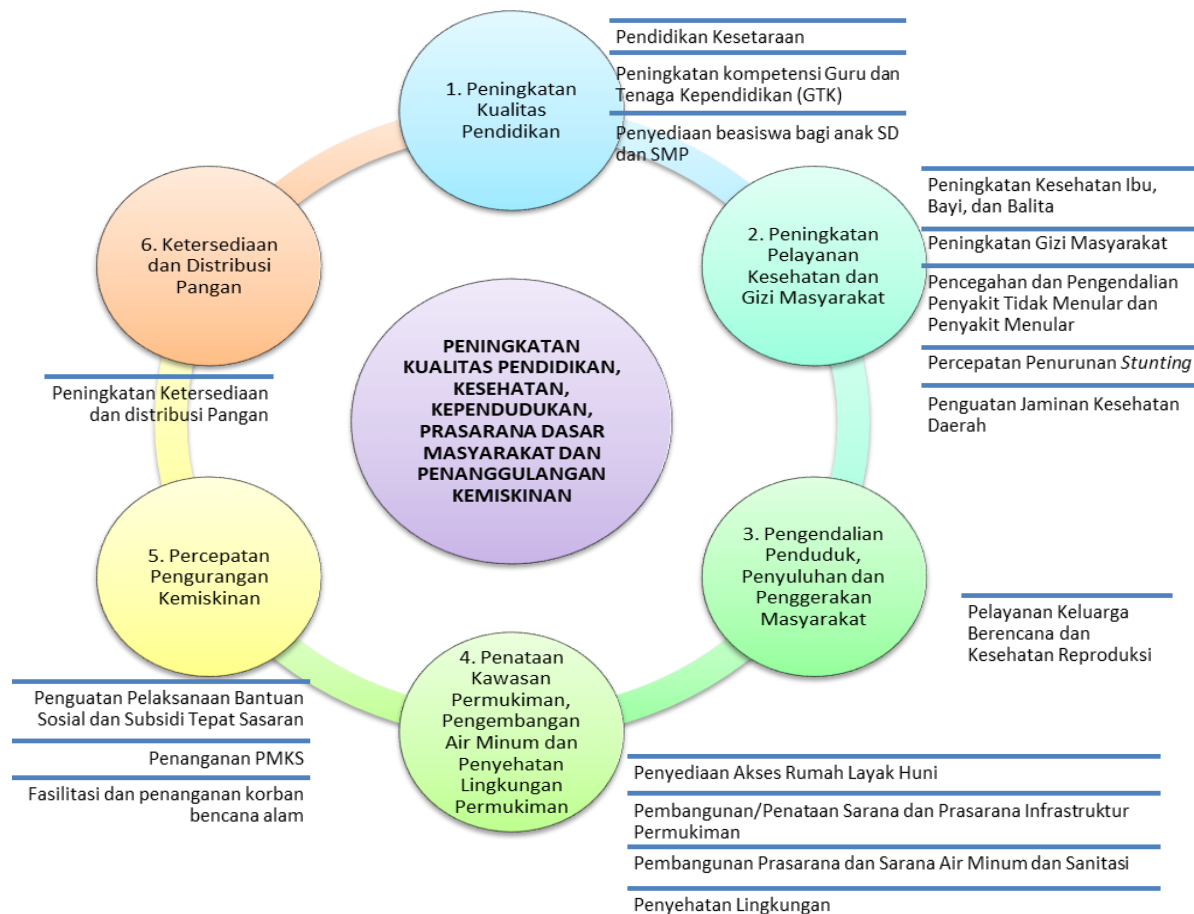
1. Prioritas “Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”

Berdasarkan capaian/hasil-hasil pembangunan sampai dengan akhir tahun 2017, pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan prasarana dasar air minum dan sanitasi masih menjadi kebutuhan utama pada pelaksanaan

periode mendatang. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang diperlukan kombinasi sinergis antara tersedianya dana/anggaran yang mencukupi, desain operasionalisasi program yang komprehensif, kejelasan lingkup kewenangan dan tanggung jawab para pelaku/pelaksana program/kegiatan, disertai aktivitas pemantauan dan evaluasi yang efektif. Fokus penanganan pelayanan dasar adalah pada desa tertinggal, desa stunting dan desa rawan STBM.

Pencapaian prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 2
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

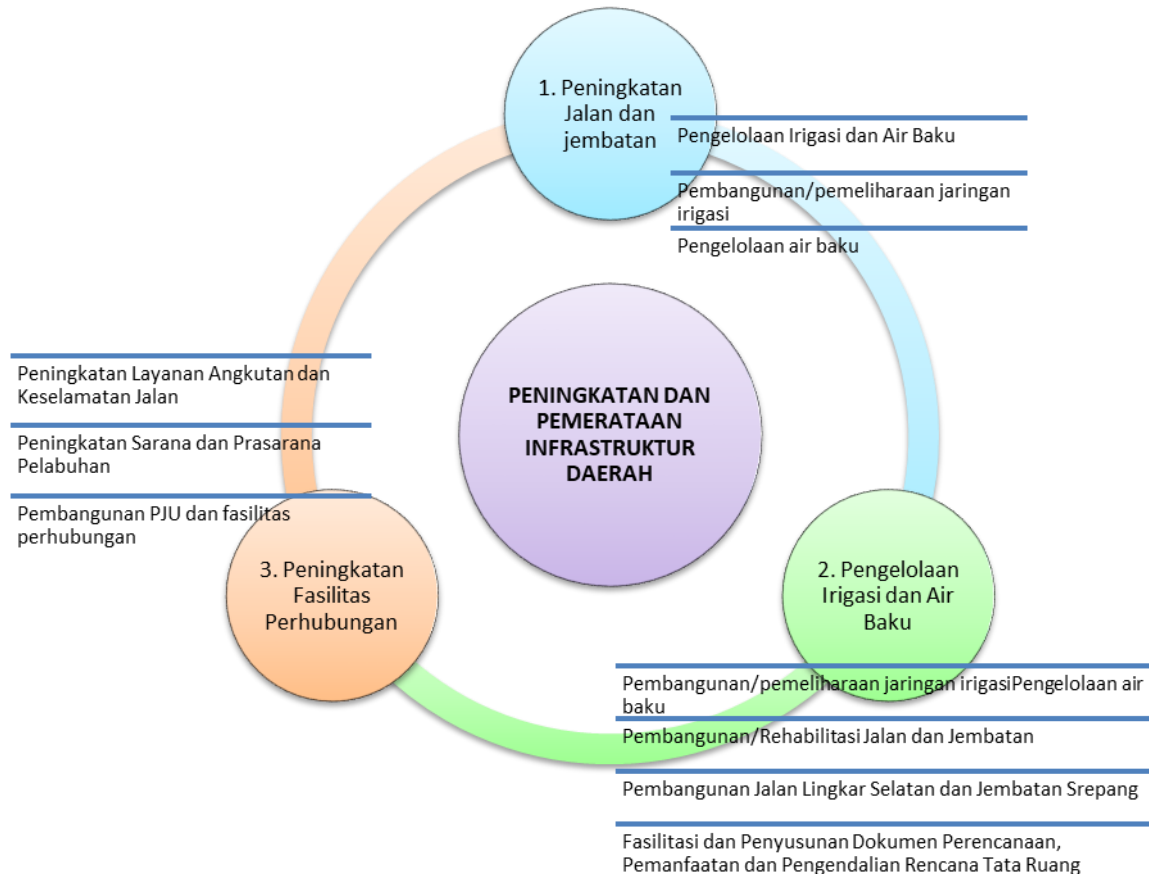


2. Pencapaian prioritas “Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah”

Pelayanan dasar berikutnya yang menjadi fokus dan relatif memerlukan dana anggaran yang besar adalah pemerataan penyediaan fasilitas jalan/jembatan yang memudahkan mobilitas masyarakat. Pemerataan jumlah dan kualitas sarana

dan prasarana dasar terutama bagi wilayah potensial menjadi pusat pertumbuhan baru dan daerah pinggiran/terpencil, sehingga potensi wilayah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pencapaian prioritas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah



3. Pencapaian prioritas “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan UMK, Pariwisata dan Agropolitan”

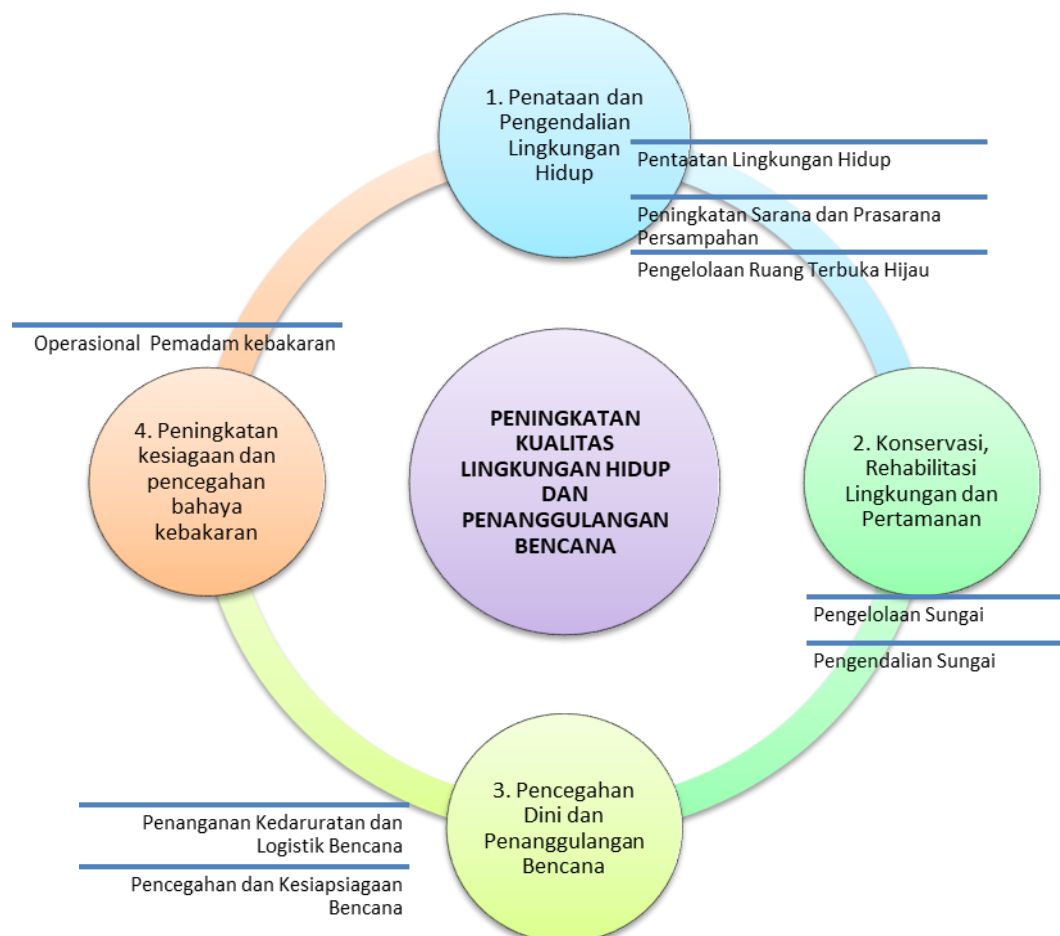
Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang dilaksanakan dengan prinsip dasar keseimbangan antara pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan bagi sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat. Pengelolaan potensi ekonomi tahun 2019 difokuskan pada pengembangan UMK, potensi pariwisata dan kawasan agropolitan di wilayah Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Tambelangan. Pencapaian prioritas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.4
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan UMK, Pariwisata dan Agropolitan



4. Prioritas “Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana” Yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memanfaatkan potensi wilayah adalah terjaminnya kelestarian dan kualitas lingkungan sebagai titipan dari generasi yang akan datang, dengan senantiasa melakukan harmonisasi (*trade off*) antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di lain pihak, permasalahan mendesak yang memiliki prioritas tinggi adalah penanggulangan bencana alam banjir yang membutuhkan anggaran besar untuk ukuran Kabupaten Sampang. Penanganan bencana alam banjir dilakukan secara integrated antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sampang selama tahun 2019. Pencapaian prioritas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 5
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana



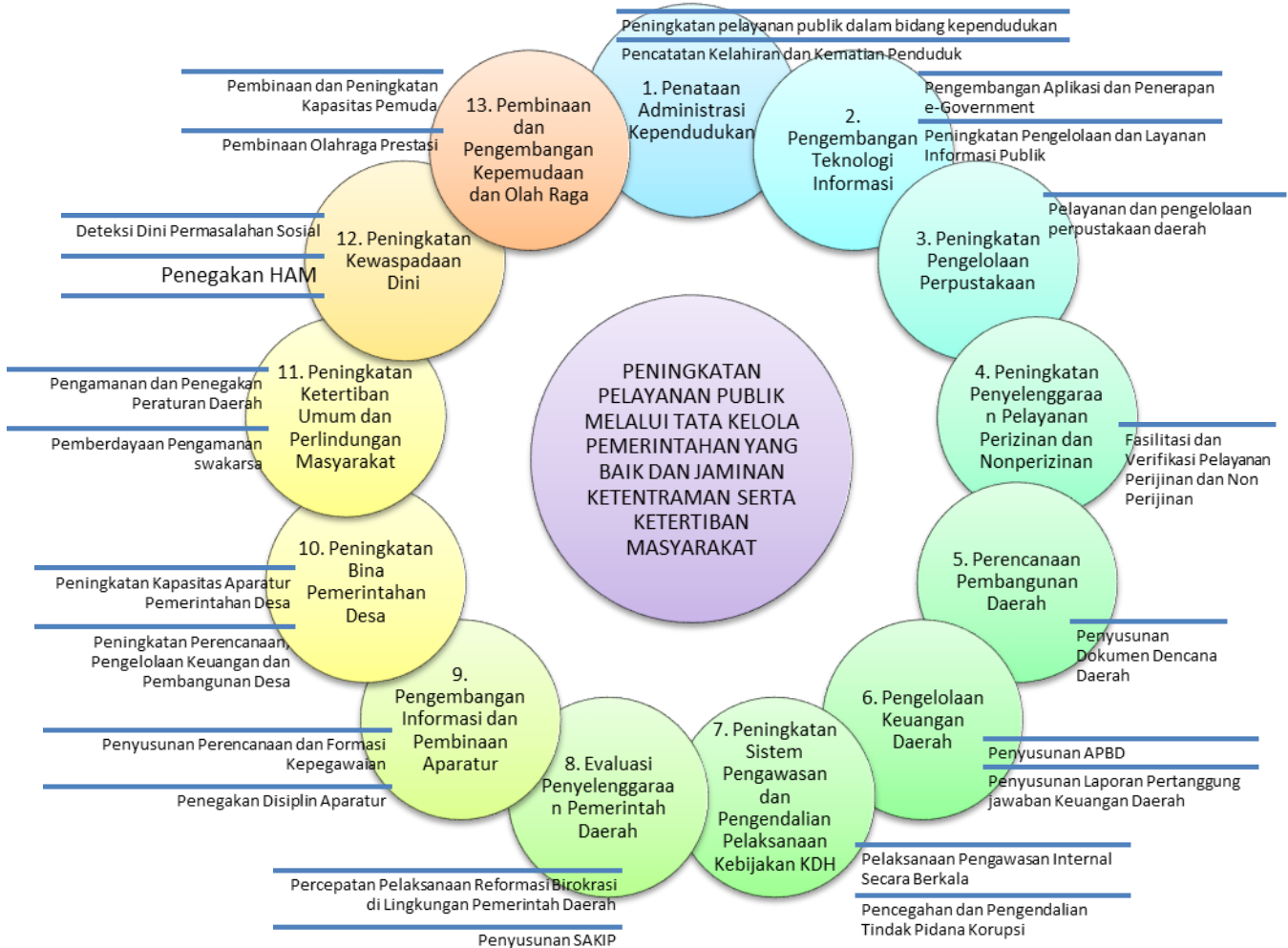


5. Prioritas “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat”

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan satu kebutuhan yang bersifat melekat untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya-upaya yang direncanakan untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional harus terstruktur dan terintegrasi. Bilamana birokrasi pemerintahan berjalan dengan baik dan profesional niscaya menimbulkan kepercayaan (*trust*) di kalangan masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sampang adalah untuk kemaslahatan sebesar – besarnya Masyarakat Sampang.

Jaminan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi hal yang penting untuk pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, menghadapi tahun politik di 2019, maka perlu diciptakan rasa aman, tentram dari gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membangun situasi yang kondusif di masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan, prioritas ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 6
Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat



4.2.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Sasaran Pembangunan tahun 2019 sebagaimana perumusan prioritas pembangunan merupakan arahan bagi Perangkat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum. Sasaran Pembangunan tahun 2019, sebagai berikut :

No	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET
1.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Indeks	13,80
			2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Indeks	4,20
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Usia Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahun	68,70
		Meningkatnya prasarana dasar masyarakat	4	Persentase rumah layak huni	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	DPRKP	%	48,62
			5	Persentase permukiman kumuh	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	DPRKP	%	14,46
		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DKBPPPA	%	1,03
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	7	Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	DKP	-	90,00
		Menurunnya jumlah penduduk miskin	8	Jumlah Penduduk Miskin	Sosial	Dinas Sosial	%	74.476
2.	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah	Meningkatnya infrastruktur daerah	1	Persentase Infrastruktur Daerah dalam Kondisi Baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang	DPUPR	%	77,24
		Meningkatnya pelayanan perhubungan	2	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Jiwa	85
3.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi & UMK	1	Persentase Pertumbuhan koperasi sehat	Koperasi dan usaha kecil, dan menengah	Diskumnaker	%	59,63

No	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET
	pengembangan UMK, pariwisata dan agropolitan		2	Persentase Pertumbuhan UMK berkualitas	Koperasi dan usaha kecil, dan menengah	Diskumnaker	%	99,65
		Meningkatnya Nilai Investasi	3	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Penanaman modal	DPMPPTSP	%	0,13
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	%	2,50
			5	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	%	8,60
			6	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	Perindustrian	Disperindag	%	5,13
			7	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Perdagangan	Disperindag	%	7,65
		Meningkatnya perkembangan pariwisata dan pelestarian budaya daerah	8	Persentase budaya yang dilestarikan	Kebudayaan	Disporabudpar	%	85
			9	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	Pariwisata	Disporabudpar	%	15,00
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga kerja	Diskumnaker	%	1,98
		4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas pengelolaan LH	1	Indeks Kualitas Air	Lingkungan hidup	DLH
2	Indeks Kualitas Udara				Lingkungan hidup	DLH	%	78,33
3	Indeks Tutupan Lahan				Lingkungan hidup	DLH	%	39,15

No	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET	
		Meningkatnya penanganan bencana alam	4	Persentase Penanganan Tanggap Bencana Alam	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD	%	100	
			5	Prosentase Infrastruktur Pengendalian Banjir berfungsi baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang	DPUPR	%	60,00	
5.	Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Opini BPK	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappelitbangda, Inspektorat, BPPKAD	-	WTP	
			2	Hasil Evaluasi Sakip	Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda	-	BB	
			3	Nilai EKPPD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda	-	3,50	
			Terwujudnya ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	4	Indeks Profesionalitas ASN	Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM	Indeks	85,00
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	10	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil	-	85,00
		Komunikasi dan informatika				Diskominfo	-	82,00	
		Perpustakaan				Disarpus	-	84,2	
Penanaman modal	DPMPTSP	-				90			
Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan	-	82,00						

No	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintah desa	5	Jumlah desa mandiri	Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD	Desa	28,00
		Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	6	Persentase penanganan gangguan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satpol PP	%	88,00
		Meningkatnya penyelesaian konflik sosial di daerah	7	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bakesbangpol	%	100,00
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	9	Persentase organisasi pemuda dan organisasi olah raga yang aktif	Kepemudaan dan olah raga	Disporabudpar	%	50,00

	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET
1.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Indeks	13,80
			2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Indeks	4,20
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Usia Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahun	68,70
		Meningkatnya prasarana dasar masyarakat	4	Persentase rumah layak huni	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	DPRKP	%	48,62
			5	Persentase permukiman kumuh	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	DPRKP	%	14,46
		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DKBPPPA	%	1,03
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	7	Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	DKP	-	90,00
		Menurunnya jumlah penduduk miskin	8	Jumlah Penduduk Miskin	Sosial	Dinas Sosial	%	74.476
2.	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah	Meningkatnya infrastruktur daerah	1	Persentase Infrastruktur Daerah dalam Kondisi Baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang	DPUPR	%	77,24
		Meningkatnya pelayanan perhubungan	2	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Jiwa	85

	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET	
3.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMK, pariwisata dan agropolitan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi & UMK	1	Persentase Pertumbuhan koperasi sehat	Koperasi dan usaha kecil, dan menengah	Diskumnaker	%	59,63	
			2	Persentase Pertumbuhan UMK berkualitas	Koperasi dan usaha kecil, dan menengah	Diskumnaker	%	99,65	
			Meningkatnya Nilai Investasi	3	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Penanaman modal	DPMPTSP	%	0,13
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	%	2,50	
			5	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	%	8,60	
			6	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	Perindustrian	Disperindag	%	5,13	
			7	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Perdagangan	Disperindag	%	7,65	
		Meningkatnya perkembangan pariwisata dan pelestarian budaya daerah	8	Persentase budaya yang dilestarikan	Kebudayaan	Disporabudpar	%	85	
			9	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	Pariwisata	Disporabudpar	%	15,00	
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga kerja	Diskumnaker	%	1,98
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan bencana alam	1	Persentase Penanganan Tanggap Bencana Alam	Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD	%	100	
			2	Prosentase Infrastruktur Pengendalian Banjir berfungsi baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang	DPUPR	%	60,00	

	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya kualitas pengelolaan LH	3	Indeks Kualitas Air	Lingkungan hidup	DLH	%	44,28
			4	Indeks Kualitas Udara	Lingkungan hidup	DLH	%	78,33
			5	Indeks Tutupan Lahan	Lingkungan hidup	DLH	%	39,15
5.	Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil	-	85,00
					Komunikasi dan informatika	Diskominfo	-	82,00
					Perpustakaan	Disarpus	-	84,2
					Penanaman modal	DPMPTSP	-	90
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan	-	82,00
		Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	Opini BPK	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappelitbangda, Inspektorat, BPPKAD	-	WTP
			3	Hasil Evaluasi Sakip	Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda	-	BB
			4	Nilai EKPPD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda	-	3,50

	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		URUSAN	OPD	SATUAN	TARGET
		Terwujudnya ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	5	Indeks Profesionalitas ASN	Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM	Indeks	85,00
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintah desa	6	Jumlah desa mandiri	Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD	Desa	28,00
		Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	7	Persentase penanganan gangguan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satpol PP	%	88,00
		Meningkatnya penyelesaian konflik sosial di daerah	8	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bakesbangpol	%	100,00
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	9	Persentase organisasi pemuda dan organisasi olah raga yang aktif	Kepemudaan dan olah raga	Disporabudpar	%	50,00

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	12
4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2019	15
4.2.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2019	21
Gambar 4. 1 Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2015-2019	14
Gambar 4. 2 Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	16
Gambar 4. 3 Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.....	17
Gambar 4. 4 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan UMK, Pariwisata dan Agropolitan.....	18
Gambar 4. 5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	19
Gambar 4. 6 Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat	21
Tabel 4. 1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2019.....	13
Tabel 4. 2 Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Sampang dengan Tema RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019	14